

ANALISIS PELUANG KEDAULATAN NEGARA PALESTINA

Ulya Fuhaidah

IAIN STS Jambi

ulyafuhaidah@yahoo.com

Abstract

This article aims to uncover the conflict in Palestine and how the future of Palestine. The conflict in Palestine resulted in endless political chaotic even though there is a resolution of bilateral and international intervention. The future of Israeli-Palestinian peace seems just something utopian considering negotiation efforts always fail applied. The findings of research indicate that the establishment of a sovereign Palestinian state is only a dream except the following three factors manifest, first, the merging of the two political factions; Hamas and Fatah in realizing its independence; second, recognition of Israel against the Palestinian authorities so that they can coexist peacefully; and third, such as Mahmoud Ahmedi Nejad statement, "Sending home Jewish community to Europe."

Keywords: Palestine, Israel, Jews, conflict, politics

Abstrak

Artikel ini berusaha mengungkap konflik di Palestina dan bagaimana masa depan Palestina. Konflik di Palestina mengakibatkan kekacauan politik tak berujung meskipun ada resolusi bilateral dan intervensi internasional. Masa depan perdamaian Palestina-Israel sepertinya hanya sesuatu yang utopis mengingat upaya perundingan selalu gagal diaplikasikan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa berdirinya negara Palestina yang berdaulat hanya impian semata kecuali tiga faktor berikut ini manifes, *pertama*, bersatunya kedua faksi politik; Hamas dan Fatah dalam mewujudkan kemerdekaannya; *kedua*, pengakuan Israel terhadap otoritas Palestina sehingga mereka dapat hidup berdampingan secara damai; dan *ketiga*, seperti pernyataan Mahmoud Ahmedi Nejad, "Untuk mengirim pulang komunitas Yahudi ke Eropa."

Kata kunci: Palestina, Israel, Yahudi, konflik, politik

Pendahuluan

Ketika Inggris menyerahkan mandat Palestina pada 14 Mei 1948 kepada PBB, Israel menggunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan negaranya, maka sejak saat itulah konflik Palestina dan Israel dimulai. Berbagai tindak kekerasan masih terus dilakukan oleh tentara Israel di wilayah berpenduduk mayoritas muslim baik di *West Bank* (Tepi Barat) maupun Gaza sebagai wilayah yang diakui sebagai daerah otoritas Palestina. West Bank merupakan kawasan di Barat Sungai Yordan yang lepas dari Yordania ketika berlangsungnya perang dengan Israel pada tahun 1967. Sementara Gaza adalah sebuah dataran sempit di Pantai Laut Tengah yang lepas dari tangan Mesir ke tangan Israel pada perang yang sama. Akhirnya, wilayah tersebut menjadi lahan sengketa antara Israel dan Palestina.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini akan mengkaji tentang perebutan kekuasaan di wilayah Palestina sehingga memunculkan konflik Arab dengan Israel yang sepertinya tak berujung. Tulisan ini akan diawali dengan sejarah singkat Palestina sampai datangnya penguasa Islam agar dapat dilacak akar konflik yang muncul, kemudian disusul dengan berdirinya Negara Israel, perjuangan melawan pendudukan Israel, serta munculnya gerakan kebangkitan Islam di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza masa kontemporer.

Sejarah Lampau Palestina

Tanah Palestina yang di masa lampau dikenal dengan Kanaan meliputi daerah seluas 25.000 km terletak di tepi laut Mediterania dan berbatasan dengan Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon. Palestina adalah tanah yang subur dengan iklim yang sedang. Secara geopolitik, Palestina merupakan negeri yang strategis namun sekaligus sensitif. Di dalamnya terdapat kota Jerusalem yang dijuluki sebagai *al-Quds* oleh umat Islam yang berarti kota suci dan dibangun di bukit Judea yang terletak di puncak bukit Moriah bersama dengan kuil Yehoveh. Bukit ini menjadi salah satu tempat penting di Palestina. Pada sisi sebelah timurnya terdapat bukit Zion, sementara pada sisi seberangnya, yakni sebelah barat dapat dijumpai bukit Olives (Sihbudi, 2004: 1).

Sejarah penting Palestina dimulai dari para Nabi terdahulu yakni Nabi Yakub yang dikenal sebagai Israel, sehingga bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub yang menjalankan misinya hanya tiga abad sebelum kelahiran Isa al-masih. Pada masa kekuasaan Firaun dan sebelum datangnya Nabi Musa, bani Israel membentuk komunitas besar di Mesir sampai akhirnya Musa memimpin Bani Israel meninggalkan perbudakan di Mesir menyeberangi gurun pasir menuju tanah yang dijanjikan.

Setelah wafatnya Musa, Joshua menjadi pemimpin Bani Israel dan membawa mereka menuju tanah yang dijanjikan melalui Yordania. Kedatangan mereka di sana mengisyaratkan dimulainya penaklukan yang meliputi perampasan dan pembunuhan terhadap masyarakat setempat. Penduduk Palestina tetap melanjutkan perlawanan terhadap invasi tersebut dan akhirnya dapat mengalahkan mereka. Peristiwa berdarah terus berlanjut yang pada akhirnya mengantarkan kemenangan Israel menguasai kota-kota penting pada tahun 1010 SM di bawah pimpinan Nabi Daud dan berhasil mendirikan Baitul Muqaddas.

Pasca Nabi Daud, Baitul Muqaddas dikelola oleh Sulaiman as selama beberapa tahun, namun sayangnya sepeninggal beliau penindasan dan penjarahan terhadap Bani Israel terulang kembali. Pada tahun 703 SM, Raja Salmenesser menginvasi Israel dan menempatkan orang-orang Babilonia di wilayah tersebut. Selanjutnya, pada tahun 586 SM wilayah kaum Yahudi ini diserang lagi oleh Nebukadnezzar II (605-562 SM). Selama penyerangan ini sebagian besar penduduk diusir dan dipenjarakan, sehingga kerajaan Yahudi digulingkan dan kuil yang dibangun oleh Sulaiman diruntuhkan.

Berdasarkan tragedi tersebut, para nabi kaum Yahudi berikutnya seperti Jeremia, Isaiah, dan Daniel, menghibur kaum Yahudi yang mengalami penderitaan, pemenjaraan, dan penghancuran kota Jerussalem yakni dengan menjanjikan pembebasan kepada mereka dan memberikan kabar gembira tentang akan datangnya juru selamat (*messiah*). Harapan mereka terwujud dengan penaklukan oleh Cyrus yang membebaskan mereka dari tahanan dan memperbolehkan mereka tinggal di sana.

Kedamaian Jerussalem berlangsung hingga akhir kekuasaan Darius III ketika Palestina ditaklukkan oleh Aleksander Agung dari Macedonia (333 SM). Kemudian pada periode selanjutnya Palestina didominasi oleh para penakluk Romawi yang dipimpin oleh Pompey. Ia memerintahkan untuk membunuh penduduk lokal dan menghancurkan kota Jerussalem sehingga konon ribuan orang Yahudi terbunuh. Dalam kondisi yang demikian, kedatangan Isa al masih sangat ditunggu-tunggu. Sang juru selamat itu dilahirkan di Nazareth (sebuah kota di Galilea). Ia menghabiskan masa hidupnya untuk mengajar di kuil. Hal ini membuat para rabi cemburu dan selalu berusaha membunuhnya sampai akhirnya mengantarkannya kepada kematian di tiang salib.

Pemerintahan Romawi yang represif menimbulkan pemberontakan kaum Yahudi. Pada 70 SM, Kaisar Titus (anak tertua Kaisar Vespasianus) melakukan gempuran terhadap kaum Yahudi yang menyebabkan mereka terpecah untuk kedua kalinya dalam sejarah. Dilema kaum Yahudi masih belum berakhir sampai pada kurun 300 M, ketika Kaisar Constantine (306-337 M) berkuasa. Pada masanya, agama Nasrani dijadikan sebagai agama resmi negara dan Jerusalem dipugar kembali serta dijadikan sebagai kota suci umat Nasrani. Bahkan selama lebih dari lima abad kemudian, Kaisar Hadrian membangunnya sebagai koloni Romawi dan melarang semua orang Yahudi masuk ke sana.

Jerussalem Setelah Datangnya Islam

Selama tiga belas tahun pertama kenabian, Masjidil Aqsha di Jerussalem dijadikan kiblat shalat pertama bagi umat Islam. Ketetapan ini baru mengalami perubahan ketika turun wahyu untuk mengganti arah kiblat ke Masjidil Haram (Ka'bah) di Makkah pada tahun 2 Hijriyah. Untuk itu posisi Jerussalem menjadi sangat penting sebagai salah satu kota suci bagi umat Islam setelah Makkah dan Madinah.

Jerussalem baru dapat ditaklukkan dan menjadi wilayah kekuasaan Islam sejak masa khalifah Umar bin Khatab. Pada masa kepemimpinannya, terjadi serangkaian penaklukan ke beberapa wilayah sekitar Jazirah Arab seperti Iraq, Syiria, dan

Mesir dengan memperoleh kemenangan yang gemilang. Mereka berhasil menaklukkan Persia pada Perang Qadisiya yang berlangsung pada 637 M dan berakibat pada runtuhnya ibu kota Persia, Ctesiphon. Kekuatan adidaya kedua yang berhasil dirobuhkan adalah kerajaan Byzantium di Anatolia. Walaupun mereka tidak mampu menduduki kekuasaan Byzantium, namun memperoleh kemenangan pada Perang Yarmuk di Palestina Utara pada 636 M. Berselang dua tahun kemudian, Jerusalem dapat ditaklukkan pula sehingga seluruh Palestina menjadi daerah kekuasaan Islam (Armstrong, 2002: 35).

Dengan otoritas khalifah, kaum Yahudi diperbolehkan untuk kembali ke kampung halaman mereka dan dijamin kebebasan serta kemerdekaan mereka dalam beribadah. Begitu pula dengan kaum Nasrani. Tidak ada lagi kelompok yang diabaikan dan diintimidasi dalam mempertahankan keyakinan mereka. Sejak saat itu hingga beberapa abad, Palestina menjadi wilayah kekuasaan Islam dengan mayoritas penduduk bangsa Arab (Esposito, 2004: 21). Ketenangan Palestina kembali terusik di Abad Pertengahan tatkala berkecamuk Perang Salib yang berlangsung hampir dua abad. Perang Salib I menyebabkan Jerusalem jatuh ke tangan kaum Nasrani, namun kondisi ini tidak berlangsung lama. Pada Perang Salib II, kota ini dapat direbut kembali ke pangkuan kekuasaan Islam di bawah komando Sultan Salahudin al-Ayyubi. Kaum Nasrani dapat diusir dari sana dan hanya Antioch, Tripoly, dan Tyre yang masih di dalam genggamannya.

Pada tahun-tahun berikutnya, silih berganti penguasa muslim maupun Nasrani menaklukkan Jerusalem dan menerapkan berbagai kebijakan politik untuk mengatur dan menguasai rakyatnya sampai pada tahun 1517, ketika kota ini jatuh ke dalam kekuasaan Dinasti Turki Usmani sebagai representasi penguasa muslim terkuat dan terakhir sampai berlangsungnya era kolonialisme hampir di seluruh negeri-negeri muslim Asia dan Afrika.

Peta dunia Islam setelah Perang Dunia I menunjukkan betapa seluruh wilayah dunia Islam didominasi kekuatan asing seperti yang ditulis oleh John L. Esposito bahwa wilayah dunia Islam jatuh ke dalam masa kolonialisme. Perancis berhasil

menancapkan kekuasaan di wilayah utara, barat, serta daerah equator Afrika dan Lebanon serta Syiria; sedangkan Inggris berkuasa di Palestina, Transyordania, Irak, Teluk Persia, dan Anak benua India, di Asia Tenggara, di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam; dan Belanda di Indonesia. Hanya wilayah Turki dan Iran yang tetap dikuasai pemimpin muslim, namun mereka terus menerus menghadapi ekspansi politik Inggris, Perancis dan Rusia sampai pemerintahan Islam hilang digantikan dengan berseminya *nations state* sebagai *trend* politik dunia pada abad ke XX (Esposito, 1996: 63).

Berdirinya Negara Israel

Ide penyatuan komunitas Yahudi sedunia dipicu oleh tulisan Theodore Herzl, seorang jurnalis Venesia (1860-1904) dalam bukunya *“The Jewish State”* yang dipublikasikan pada tahun 1896. Sejumlah kaum Yahudi mulai mengambil langkah menegakkan Negara Yahudi dengan menyelenggarakan Kongres Zionis se-Dunia Pertama di Basel, Swiss, yang mengumpulkan para Zionis dari berbagai aliran dan golongan sosial. Mereka mendirikan Organisasi Zionis Sedunia (*World Zionist Organization*) yang menyerukan kepada bangsa Yahudi agar mendirikan tanah air atau tempat tinggal untuk kaum Yahudi di Palestina (Meuleman, 2002: 22). Langkah mereka didorong dan didukung oleh pemerintahan Lyold George di Inggris dan beberapa tokoh berpengaruh di Amerika. Pada puncaknya, November 1917 dideklarasikan Deklarasi Balfour yang disusun oleh Lord Balfour (Sektretaris Luar Negeri Inggris) yang berisi tentang dukungan bagi berdirinya Negara Yahudi di wilayah Palestina dengan Chalm Weizmann sebagai presiden pertamanya (1874-1952). Pemerintahan Inggris memberikan izin masuk dan memperoleh tanah di Palestina, melindungi komunitas Yahudi dari kerusuhan, serta mengizinkan pengorganisasian institusi politik Yahudi dan pembentukan angkatan bersenjata Yahudi (Reich, 1980: 274). Di bawah kekuasaan Inggris, komunitas Yahudi tumbuh dengan pesat sehingga perlawanan dan pemberontakan Arab adalah jawaban atas pendudukan Inggris dan kaum Yahudi tersebut.

Pada musim panas 1929, terjadi konfrontasi berdarah pertama antara bangsa Arab Palestina dengan kaum Yahudi yang mengusung gerakan zionisme. Kaum Yahudi dan pemerintahan Inggris menyerang bangsa Arab Palestina. Peristiwa ini memakan korban jiwa dan korban luka-luka yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu, munculah tokoh kharismatik, Syech Izzudin al-Qasam yang memimpin perang dan pemberontakan bersenjata melawan agresi kaum Yahudi pada tahun 1935. Ia bersama pasukannya bergerak di wilayah West Bank dan menghimpun beberapa ratus pasukan bersenjata di Haifa sebagai upaya mengusir pendudukan Inggris dan memerdekakan Palestina. Sayangnya perjuangan mereka tidak membuahkan hasil. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, pasukan al-Qassam dapat dikalahkan dengan mudah.

Pada tahun 1937, Abdul Qadir Husaini mengambil alih komando perjuangan, namun akhirnya ia terbunuh. Ia kemudian digantikan oleh Hasan Salameh pada 1940 dan melancarkan perang gerilya melawan persekutuan Inggris-Yahudi. Akan tetapi perlawanan mereka masih dapat dipatahkan dan pemimpinnya pun terbunuh juga. Seiring dengan peristiwa ini maka permasalahan Palestina selalu menjadi permasalahan Arab dan kegelisahan bagi komunitas internasional.

Dihadapkan pada persoalan perjuangan bangsa Palestina dan reaksi politik Arab, pemerintah Inggris kemudian mengubah kebijakannya dengan mengeluarkan *White Paper 1939* yang memutuskan untuk membatasi migrasi kaum Yahudi dan pembelian tanah-tanah Palestina oleh kaum Yahudi. Deklarasi *White Paper 1939* ternyata tidak terealisasi dengan baik dan justru berujung pada konflik yang kian meruncing (Meuleman, 2005: 25). Hal ini dipicu oleh organisasi zionis yang menginginkan terbentuknya negara merdeka di Palestina. Isu ini digulirkan pada saat sidang umum PBB yang berlangsung pada bulan Desember 1946 yang merekomendasikan bahwa Palestina terbagi menjadi 45,4 % untuk penduduk Arab dan 54,6 % untuk kaum Yahudi. Daerah lain yang mencakup Jerussalem dan sekitarnya menjadi wilayah di bawah pengawasan internasional. Pembagian tersebut disahkan oleh resolusi PBB 181 pada tanggal 29 Desember 1947. Keputusan ini tentu saja membuat kaum

Yahudi menerima dengan senang hati, namun sebaliknya penduduk Arab menolak dengan amarah. Kekerasan antar etnis pun meletus dan pada puncaknya terjadi saat penyerahan mandat oleh Inggris pada 15 Mei 1948. Pada akhirnya Dewan Nasional Yahudi didirikan di Tel Aviv dan Negara Israel pun lahir.

Perjuangan Melawan Pendudukan Israel

Perjuangan melawan kaum Yahudi dimulai seketika pasca hengkangnya Inggris dari Palestina. Pada tanggal 15 Mei unit pasukan negara Suriah, Yordania, Mesir dan Irak masuk ke Palestina untuk mendukung bangsa Arab Palestina. Pada awalnya mereka memperoleh kemenangan gemilang, namun Israel melancarkan serangan balasan dibantu oleh pasukan koalisi Eropa dan Amerika dengan persenjataan yang lebih mutakhir. Pertempuran yang tidak seimbang itu berakhir dengan kekalahan di pihak Arab yang berimbas pada eksodus besar-besaran bangsa Arab Palestina sehingga mereka menjadi bangsa yang tidak mempunyai tanah air.

Berikut ini adalah beberapa peperangan yang terjadi antara pasukan Palestina melawan Israel sebagai perjuangan melawan penindasan sejak diproklamkan kemerdekaan Israel.

1. Perang 1948

Perang ini dipicu oleh proklamasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948. Selain itu, kegagalan PBB dalam menyelesaikan sengketa Yahudi-Arab Palestina melalui Rencana Pembagian Palestina (*Palestina Plan*) tahun 1947 dan propaganda Yahudi tentang peristiwa Holocaust sebelum Perang Dunia II juga menjadi penyebab utama munculnya perang ini. Berbagai peristiwa tersebut kemudian memunculkan reaksi dari beberapa negara tetangga seperti Mesir, Transyordania, Irak, dan Suriah yang melakukan penyerangan terhadap Israel yang baru merdeka.

Akibat dari perang ini Israel menguasai 77% wilayah Palestina termasuk menguasai teluk Aqaba sehingga memudahkan mengakses jalur laut dengan negara-negara Arab tetangganya. Ini berarti bahwa bangsa Arab Palestina

kehilangan wilayahnya secara total karena Jalur Gaza menjadi wilayah Mesir dan West Bank menjadi milik Yordania di tahun 1950. Bangsa Arab Palestina menjadi bangsa yang tersebar (diaspora) karena meninggalkan Palestina ke wilayah Yordania maupun Mesir, Libanon, dan Suriah.

2. Perang Suez 1956

Perang Suez muncul karena Presiden Gamal Abdul Nasser menasionalisasi Terusan Suez yang berada di bawah kepemilikan Anglo-French Suez Canal Company. Ia mengharuskan semua kapal yang melewati Teluk Aqaba untuk meminta izin kepada pemerintah Mesir. Berdasarkan ketetapan ini, maka aliansi tiga kekuatan besar yaitu Inggris, Perancis, dan Israel menyerang Mesir, Inggris menyerang Suez dan Israel menyerang Sinai. Selain faktor di atas, Israel melancarkan serangan ke Mesir bertujuan untuk melemahkan para gerilyawan Palestina karena semua kebutuhan logistik dan persenjataan Palestina diselundupkan dari negeri ini.

Akibat perang ini memunculkan reaksi keras di kalangan dunia internasional. PBB ikut berperan menyelesaikan konflik dengan menempatkan pasukan khusus *United Nations Emergency Force* (UNEF) di sepanjang perbatasan Mesir-Israel. Sementara Perancis dan Inggris kehilangan *prestise* di dunia internasional karena kehilangan hak atas Terusan Suez.

3. Perang Enam Hari (5-11 Juni 1967)

Perang ini sebagai buntut panjang perselisihan perang Suez yang berkecamuk sebelumnya. Mesir menganggap bahwa penempatan pasukan PBB di wilayah perbatasan sebagai bentuk provokasi. Untuk itu, pada bulan Mei 1967 Mesir meminta agar UNEF meninggalkan Sinai, termasuk Sharm al-Shaykh. Mesir juga menutup Teluk Aqaba bagi pelayaran Israel.

Akibat peperangan ini, Israel memperoleh tiga kali lipat wilayah yang diperoleh pada perang 1948. Israel menduduki semenanjung Sinai termasuk Sharm al Syakh Selat Tiran, Jalur Gaza, The West Bank, Dataran Tinggi Golan, dan semua wilayah Jerussalem. (Reich, 1980: 301). Dengan demikian Israel menjadi negara yang secara militer diperhitungkan di dunia Arab dan menjadi salah satu negara militer yang terkuat di dunia.

4. Perang Karamah 1968

Pada bulan Maret 1968, sebuah serangan Israel ke kota Karamah menyulut pertempuran dengan gerilyawan Palestina di Yordania. Akibat perang ini Israel mengalami kekalahan sehingga mendorong semangat juang bangsa Palestina untuk membebaskan diri (Sihbudi, 2004: 50).

5. Perang Ramadhan / Yom Kipur 1973

Pada bulan Oktober 1973, pasukan Mesir melakukan serangan mendadak atas pasukan Israel melalui Terusan Suez, namun pasukan ini dapat dipukul mundur oleh Israel.

6. Konflik Palestina di Lebanon

Lebanon menjadi pusat gerilyawan Palestina setelah terjadi tekanan oleh rezim Yordania pada 1970-1971. Perang Sipil berkobar pada Mei 1975 oleh serangan bom kaum palangis dalam sebuah bus yang ditumpangi rombongan Palestina. kekerasan puncak terjadi pada kamp pengungsian Palestina *Teel Zataar* di Beirut Timur.

7. Perang Arab-Israel 1982

Setelah tahun 1983, dapat dikatakan hampir tidak ada deklarasi perang tetapi yang ada ialah tindakan kekerasan. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh pihak Palestina maka akan disebut sebagai tindakan teror, dan apabila dilakukan oleh Israel akan disebut sebagai tindakan defensif.

Perjuangan melawan Israel dilalui melalui beberapa fase. Sejak tahun 1948-1967, negara-negara Arab menjadi pimpinan dalam perjuangan, namun pasca kekalahan mereka pada perang 1967 Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menjadi wakil perjuangan Palestina. Organisasi ini didirikan pada 1964 sebagai sebuah front pembebasan yang di dalamnya mencakup beberapa faksi seperti Faksi Fatah pimpinan Yasser Arafat dan memperjuangkan kebebasan melalui cara diplomatik (Wikipedia, 2012: 1), namun usaha diplomatik ini dinilai tidak akan mampu mengantarkan pembebasan Palestina, karenanya kemudian muncul gerakan perlawanan di luar PLO seperti *Itifadah* di West Bank, dan Hamas serta Jihad Islam di Jalur Gaza. Kelompok ini

memperjuangkan Palestina dengan cara yang sangat keras dan bahkan seringkali melakukan bom bunuh diri di tempat umum wilayah Israel (Maryam, 2003: 370).

Kebangkitan Gerakan Islam

Sejumlah pemberontakan yang terjadi sebagai protes atas pendudukan Inggris dan migrasi kaum Yahudi ke Palestina pada dasarnya mempunyai dimensi politik, ekonomi, maupun sosial. Sebagai perintis, pada tahun 1930-an suatu pemberontakan Islam dipimpin oleh Syekh Izzudin Qasam dari Palestina Utara dengan para pengikutnya dari wilayah pedesaan. Tujuan gerakan al Qasam adalah untuk membangkitkan kembali umat Islam dan memimpin jihad melawan Inggris dan Yahudi, namun gerakan ini tidak berhasil karena berakhir begitu saja setelah kematian al Qasam.

Pada pertengahan 1940-an, Ikhwanul Muslimin di Mesir mengirimkan sejumlah pengikutnya ke Palestina untuk mendirikan cabang-cabangnya. Sejak akhir tahun 1946 telah didirikan beberapa cabang di sejumlah kota di Palestina termasuk Jerussalem, Nablus, Tulkarem, Haiffa, dan Jaffa. Pada 1949 cabang yang lain didirikan di Hebron dan sejak pertengahan 1950-an cabang-cabang didirikan di kota-kota West Bank (Hunter, 2001: 148). Selama perang Arab-Israel tahun 1948, Ikhwanul Muslimin di Mesir mengirim sejumlah sukarelawan untuk menghalangi pembentukan negara Yahudi.

Suatu partai baru, al Tahrir (pembebasan) didirikan pada 1951 oleh Ahmad Taqi al-Din Nabhani (Wamy, 2002: 88-94). Program partainya *Inqilabiya* atau penggunaan kekuatan militer untuk menggulingkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Oleh karena itu pemerintahan Yordania menyatakan partai ini ilegal selama kekuasaannya di West Bank pada 1950-1967, akibatnya partai ini bergerak di bawah tanah dan mendapat dukungan dari kota-kota bagian utara dan wilayah selatan West Bank.

Selama dua dasawarsa yakni antara tahun 1948 sampai 1967, gerakan politik Islam sangat lemah terutama Ikhwanul Muslimin yang mendapat tekanan dari Naser di Mesir dan Partai Bath di Suriah. Selain itu iklim politik di dunia Arab pada pertengahan 1950-an sampai 1960-an tidak kondusif bagi

penyatuan gerakan-gerakan Islam meskipun ditandai oleh permusuhan terhadap Barat, sentimen anti kolonialis, penegasan pada kemerdekaan nasional, dan keberhasilan dalam keadilan sosial serta ekonomi.

Sejak akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an situasinya mulai berubah. Sejumlah kondisi lokal dan regional telah mendorong bangkitnya kecenderungan Islam terutama di kalangan kaum muda. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendorong munculnya gerakan radikal Islam di Palestina.

Pertama, inisiatif-inisiatif Arab, Palestina, dan dunia internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel di West Bank dan Jalur Gaza tidak membuahkan hasil. Perpecahan yang pahit di dunia Arab dan perpecahan dalam PLO juga menjadi salah satu faktor. Dalam pandangan kaum muda, hanya kekuatan Islam yang mampu menawarkan jalan keluar bagi persoalan Palestina (Hunter, 1994:151).

Kedua, revolusi Islam di Iran pada 1979 dan pembunuhan Presiden Anwar Sadat merupakan pendorong bagi tumbuhnya kecenderungan di wilayah pendudukan. *Ketiga*, gerakan Islam di West Bank dan Jalur Gaza juga merupakan respon atas kebangkitan Partai Likud di Israel. Perdana Menteri Begin dan para pemimpin Likud lainnya menganggap wilayah ini sebagai tanah Yahudi sehingga kaum Yahudi bebas menempati daerah tersebut.

Keempat, perang Israel melawan PLO dan pembunuhan besar-besaran di kamp pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila juga memunculkan perasaan memperjuangkan negara Islam di wilayah pendudukan. Kelima, perkembangan politik di wilayah West Bank dan Jalur Gaza telah memberikan kontribusi lebih jauh bagi pertumbuhan kecenderungan politik Islam. gerakan Islam muncul sebagai reaksi tandingan terhadap meningkatnya komunis di West Bank dan Kelompok Marxis lainnya.

Manifestasi Gerakan Islam

Gerakan Islam dapat dilihat melalui tiga tingkatan di wilayah pendudukan yakni secara individu, lembaga sosial pendidikan, dan lembaga politik. Secara individu, peran dalam

penyebaran gerakan Islam kurang signifikan. Lembaga sosial pendidikan lebih menjanjikan untuk bangkitnya kembali kebudayaan Islam. Hal terpenting adalah dengan didirikannya tiga perguruan tinggi Syariah di Jerussalem, Hebron, dan Gaza. Setiap tahunnya perguruan tinggi ini memberikan *out put* generasi muda muslim yang akan menggantikan para imam tradisional di masjid-masjid West Bank dan Jalur Gaza.

Pada umumnya gerakan muda terdiri dari lima kelompok yakni pendukung Ikhwanul Muslimin, partai al Tahrir, Kelompok muslim pro Fatah, dan *Da'wah wa Tabligh*. Masing-masing kelompok mempunyai pendekatan dan metode tersendiri menyelesaikan konflik. Kelompok pertama, Ikhwanul Muslimin bertujuan untuk kembali membentuk masyarakat yang Islami dan mendirikan negara Islam. Ikhwan mempertahankan kebijakan ini sampai *Intifadah* dengan dideklarasikannya Hamas sebagai sayap militernya. Organisasi tersebut dibentuk dalam dua tahap. Pada pertengahan Desember 1987, beberapa tokoh seperti Abdul Azis al Rantisi, dokter Universitas Gaza; Shalah Sahada dan Yahya al Sinuwar memprakarsai struktur mobilisasi yang disebut *Harakat al Islamiah al Muqawamah* (Gerakan Perlawanan Islam atau Hamas). Baru pada Februari 1988, al Ikhwan secara resmi mengakui Hamas sebagai sayap militernya. Keputusan ini ditetapkan di Amman selama pertemuan antara tokoh-tokoh al Ikhwan Palestina dan Yordania yakni: Syekh Abdurahman Khalifah, Ali al Hawamda, Ziyad Abu Ghanimah, Hamzah Mansur dan Hamam Said (Legrain, 2004: 257).

Organisasi baru ini semula menarik Ikhwan secara perorangan saja, tetapi pada Februari 1988, Ikhwan secara resmi mengeluarkan *mithaq* yang dipublikasikan pada Agustus 1988, bahwa Hamas adalah anti Israel dan sebagai penerus cita-cita Ikhwanul Muslimin 1930-an. Israel, Negara Yahudi yang menghendaki kehancuran Islam tidak boleh eksis secara sah dan aksi militer sebagai jihad suci merupakan satu-satunya pilihan untuk membebaskan Palestina (Legrain, 2001: 145). Piagam ini juga menentang sekularisme sebagai ideologi yang bertentangan dengan agama, dan menyebut nasionalisme Palestina sebagai bagian dari iman.

Kemunculan Hamas menandai titik balik perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel. Hamas mendukung aksi-aksi *intifadhah* yang pada umumnya bersifat nirkekerasan dan damai. Pada saat yang sama Hamas memiliki faksi militer bernama Brigade Izzudin al-Qassam yang melancarkan aksi kekerasan di Israel. Hamas menganggap perjuangan melawan pendudukan Israel baik melalui *intifadhah* maupun melalui aksi militer merupakan jihad, oleh karena itu pada tahun 1989 Israel menyatakan Hamas sebagai organisasi ilegal (Benin dan Stork, 1997: 339).

Pendukung Hamas berasal dari kalangan konservatif masyarakat Palestina yang menganggap nasionalisme sekuler yang diperjuangkan PLO tidak sesuai dengan agama Islam, serta cenderung kepada korupsi, materialisme, bahkan kebobrokan PLO. Hamas menekankan pada kesalehan pribadi dan keharusan menerapkan syariat dalam berbagai aspek kehidupan. Kalangan muda Palestina menerima Hamas sebagai bentuk perjuangan membela hak-hak kaum Palestina dan Islam sebagai jalan keluar. Keduanya dianggap saling berhubungan karena Islam adalah identitas yang tidak terpisahkan dari Palestina (Laquer, 2005: 183).

Sebagai gerakan dan organisasi, Hamas bersifat modern jika dilihat dari cara-cara mobilisasi dan organisasi massa. Hamas populer di masyarakat karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah pendudukan khususnya di Gaza. Selain memiliki badan-badan wakaf dan masjid, Hamas juga memiliki lembaga dan asosiasi untuk memperluas jaringan seperti toko, apartemen, dan bangunan publik yang disewakan kepada warga. Selain itu juga mempunyai reputasi yang baik dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan (Panggabean, 2002: 91). Tidak mengherankan jika Hamas kemudian memperoleh dukungan kuat di masyarakat. Hal ini terbukti dari kemenangan suara Hamas pada pemilu 2006 yang secara mengejutkan mengungguli kepopuleran Fatah pada pemilu legislatif dengan memperoleh 76 dari 132 kursi Parlemen Palestina.

Dengan semakin luasnya dukungan terhadap Hamas, timbul pula tantangan dalam organisasi itu tentang keragaman

internalnya, di mana generasi tua dan muda berbeda pendapat. Dilema yang harus dihadapi adalah bagaimana menggabungkan aneka unsur ideologi, seperti konservatisme sosial keagamaan dan nasionalisme radikal dalam satu gerakan sosial. Sikap-sikap politik gerakan Islam di wilayah pendudukan sebagian dibentuk oleh sikap kelompok eksternal, dan sebagian lagi oleh perkembangan politik di West Bank dan Jalur Gaza sendiri. Bagi kelompok gerakan Islam, baik nasionalisme Arab maupun Palestina telah gagal untuk memecahkan masalah warga Palestina. Hal ini tidak mengejutkan karena memang konsep nasionalisme dianggap sebagai konsep asing bagi kebudayaan Arab dan Islam yakni pinjaman dari Barat. Dalam Islam hanya mengenal konsep *ummah* (Arief, 2004: 1). Mereka juga menganggap bahwa nasionalisme sekuler memecah belah dunia Islam melalui ide nasionalismenya.

Dalam pandangan para anggota gerakan Islam, persoalan Palestina adalah persoalan keagamaan. Konflik antara Arab-Israel tidak memberi ruang untuk kompromi. Kalangan ini tetap tidak mau menyerah untuk mengakui Israel. Mereka memandang siap berperang dengan setiap negara atau organisasi yang mau kompromi dengan territorial Israel. Konfrontasi dengan Israel diyakini akan bersifat total, komprehensif, dan akan diperangi dengan seluruh sarana yang ada.

Para pendukung gerakan Islam menyesalkan orientasi politik dan kebijakan luar negeri PLO yang tidak menyertakan Islam, sehingga kelompok-kelompok Islam telah menyatakan ketidaksetujuannya untuk membentuk negara sekuler di Palestina. Melihat konflik Palestina yang berkepanjangan ini, perlu terobosan politik yang berani dari negara-negara Arab dan Dunia Islam bersatu melawan Israel yang didukung oleh AS.

Penyelesaian Konflik Palestina-Israel

Akibat konflik Palestina-Israel telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi dunia Arab maupun internasional. Persoalan Palestina-Israel bahkan seringkali dianggap sebagai pertarungan Yahudi-Islam sebagai satu agama, sehingga banyak pihak berkepentingan menyelesaikan pertikaian mereka mulai dari negara-negara di kawasan Arab bahkan sampai Amerika. PBB sebagai satu organisasi keamanan dunia pun tidak tinggal

diam dalam mengupayakan penyelesaian konflik dengan mengeluarkan beberapa resolusi seperti: Resolusi PBB No 242 pasca Perang 1967 yang memerintahkan agar Israel keluar dari wilayah Palestina; Resolusi PBB No 338 pasca perang 1973; Resolusi No 42 pasca perang 1982 dan resolusi-resolusi lain yang intinya mengatur perdamaian ke dua pihak. Akan tetapi tidak satu pun dari resolusi-resolusi tersebut yang dipatuhi oleh Israel. Akibatnya konflik berkembang semakin luas dan penuh dengan kekerasan, serta banyak memakan korban. Meskipun demikian tindakan-tindakan kekerasan tidak mampu memperbaiki nasib bangsa Palestina.

Selain dikeluarkannya resolusi oleh PBB, tidak sedikit pula perundingan damai yang diupayakan untuk menyelesaikan konflik seperti berikut (Setiawati, 2004: 220).

1. Perjanjian Camp David September 1978

Perjanjian ini menghasilkan satu putusan yaitu pengakuan Israel oleh Mesir, dan sebagai imbalannya Israel menarik pasukannya dari Sinai. Sayangnya perjanjian ini tidak berhasil karena perang Arab-Israel kembali berkobar.

2. Konferensi Perdamaian di Madrid 1991

Konferensi ini diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Uni Sovyet dengan mengajak negara-negara Arab seperti Suriah, Mesir, Lebanon, Yordania dan pihak Palestina, namun bukan PLO. Akibatnya perjanjian ini dianggap gagal karena tidak mengajak wakil sah Palestina yang diakui PBB yakni PLO.

3. Perundingan Oslo I 13 September 1993

Perundingan ini dihadiri oleh Yasser Arafat dan Yitsak Rabin, disaksikan oleh Bill Clinton dan Raja Hussein. Hasil utama perjanjian ini adalah pengakuan eksistensi PLO dan Israel dengan cara pembentukan dua negara dalam satu wilayah.

4. Perundingan Oslo II 28 September 1995

Perundingan ini sebagai kelanjutan perundingan pertama dan memutuskan untuk memberikan otonomi terbatas pada PLO di West Bank yang meliputi 7 kota yaitu Jenin, Nablus, Hebron, Tulkarem, Qaqliyah, Ramallah, dan Bethlehem. Perundingan ini

pun dinilai gagal karena adanya protes kelompok akar rumput dari kedua pihak.

5. Perundingan Wye River I di Washington 1999
6. Perundingan Wye River II di Sharm el Sheikh Mesir pada September 1999
7. Perundingan Camp David Juli 2000

Salah satu keputusan perundingan ini adalah kemungkinan kemerdekaan Palestina di Jerman Timur akan tetapi ditolak oleh Ariel Sharon PM baru dari Partai Likud yang terpilih.

8. Perundingan di Geneva Swiss Oktober 2003

Perundingan diprakarsai Yossi Belilin (mantan menteri Israel) dan Yossi Abeed Rabbo (mantan menteri penerangan). Isi perundingan ini menyepakati penyerahan 25,5% pemukiman Israel untuk bangsa Palestina. Namun perjanjian ini pun tidak mencapai hasil karena Ariel Sharon terus melakukan tindakan penyimpangan-penyimpangan.

Perkembangan mutakhir saat itu bahkan menunjukkan bahwa Sharon memerintahkan pendirian zona pengaman yang tidak dapat dimasuki warga Palestina di Gaza Utara, kebijakannya diumumkan pada rapat kabinet dan pejabat keamanan pada Minggu, 25 Desember 2005. Zona pengaman ini lebarnya 2,5 km dan panjangnya membentang mulai dari bagian utara hingga pinggir timur Jalur Gaza (Kompas 27 Desember 2005). Selain membangun zona pengaman Israel juga sedang merencanakan membangun 228 rumah tambahan di pemukiman Yahudi.

Tindakan Ariel Sharon di atas dinilai sebagai pelanggaran paling nyata terhadap komitmen Israel menjalankan peta perjanjian damai yang didukung Amerika Serikat. Peta perjanjian damai ini dicetuskan pada 3 Juli 2003 di Sharm el Sheikh Sinai pada KTT Arab-Amerika. Salah satu hasil perundingan ini adalah larangan bagi Israel untuk menghentikan semua pembangunan pemukiman Yahudi. Akan tetapi perundingan demi perundingan tidak pernah berbuah manis. Konflik Palestina-Israel masih terus berlangsung sampai saat ini. Insiden berdarah antar dua kelompok itu masih sering

diliput oleh media massa maupun media elektronik. Palestina melewati jalan berliku dan terjal untuk memperjuangkan eksistensinya sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh baik secara internal maupun eksternal (Mial et all, 2002: 283).

Tragedi yang sangat tragis bahkan terjadi pada 31 Mei 2010, ketika kapal Mavi Marmara yang berisi para relawan dari berbagai negara (termasuk relawan asal Indonesia) dan mengangkut logistik maupun obat-obatan bagi rakyat Palestina diserang secara brutal oleh tentara Israel. Para relawan ditembaki dan kapal tidak diperbolehkan memasuki wilayah perairan Palestina. Padahal laut merupakan satu-satunya jalan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, mengingat Mesir menutup akses jalan darat untuk memasuki wilayah itu. Kecaman dunia internasional seolah tak berarti bagi Israel. Pelanggaran terhadap hak azasi manusia tetap berlangsung sampai kini.

Palestina akhirnya memperoleh dukungan dari dunia internasional untuk diakui sebagai anggota penuh dalam sidang umum PBB. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, Liga Arab, Uni-Afrika, serta anggota non-Blok sudah mendukung penuh, namun Dewan keamanan PBB sendiri terpecah dan setengah hati untuk mendukung Palestina menjadi anggota tetap PBB. Penolakan utama berasal dari Amerika Serikat yang selalu menerapkan standar ganda bagi negara-negara Islam di Timur Tengah. Kebijakan Amerika ini dapat dilihat dari bagaimana pendekatan yang diterapkan oleh pemerintahan para presiden Amerika seperti: Carter terhadap Islam politik dalam Revolusi Iran, Reagan, Bush dan Clinton, serta George Walker Bush yang melihat kebangkitan Islam sebagai ketakutan dan ancaman bagi Amerika dan sekutunya di Timur Tengah (Gerges, 2002: 4). Islam selalu identik dengan terorisme dan pengusung fundamentalisme. Hanya Barack Obama yang belakangan memandang Islam lebih simpatik dan mencoba mengeliminir gelombang kekerasan di Timur Tengah, dengan mengutamakan jalan damai (dialog) daripada kekuatan militer. Aksinya dapat dilihat melalui kampanye untuk menghentikan berkecamuknya perang Irak yang mengantar-

kannya sukses menjadi Presiden Amerika ke-44. Akan tetapi sangat disayangkan, ketika Obama sudah berhasil menjadi Presiden Amerika ia tidak juga berhasil menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Bahkan saat presiden otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengajukan permohonan agar Palestina menjadi anggota penuh PBB pada September 2011 silam, Amerika sebagai Dewan Keamanan tidak juga tergerak untuk menjatuhkan veto.

Penutup

Sebagai tulisan akhir, penulis menganggap bahwa masa depan perdamaian Palestina-Israel sepertinya hanya sesuatu yang utopis mengingat upaya perundingan selalu gagal diaplikasikan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kekuatan pemaksa jika salah satu negara melanggar isi perjanjian. Amerika Serikat yang selama ini berperan sebagai polisi dunia untuk menjaga keamanan tidak berperan netral sebagai mediator perdamaian, sehingga perundingan apapun tidak akan berhasil. Dengan kondisi seperti ini bukan tidak mungkin jika konflik Palestina-Israel tidak akan selesai sampai kapan pun dan kekerasan akan terus terjadi antara kedua negara. Bahkan saat ini sedang berlangsung unjuk rasa rakyat Palestina dengan melancarkan aksi mogok makan untuk menunjukkan solidaritas bagi para tahanan Palestina yang tidak mendapat keadilan di penjara Israel (Republikaonline.com).

Selain ketiadaan dukungan eksternal seperti di atas, secara politik Negara Palestina yang diproklamirkan mendiang Yasser Arafat dari pengungsian di Aljir pada 15 November 1988 dibangun sangat rapuh tanpa tanah air dan wilayah geografis yang jelas. Mereka mengklaim Jerussalem Timur sebagai ibu kota dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai wilayahnya. Secara ekonomi, pembiayaan negara juga berasal dari pendapatan yang tidak menentu. Keuangan terbesar berasal dari donasi negara-negara tetangga yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Palestina. Selanjutnya, secara *de facto* Pemerintahan Otoritas juga terpecah antara Hamas dan Fatah. Fatah yang berhasil memenangi pemilu mampu mengantarkan Mahmoud Abbas sebagai presiden otoritas dan bekedudukan di Tepi Barat, sementara wilayah Gaza dikuasai oleh mantan

Perdana Menteri Ismail Haniya dari Hamas. Dengan demikian, berdirinya negara Palestina yang berdaulat hanya impian semata kecuali tiga faktor berikut ini manifes: *pertama*, bersatunya kedua faksi politik tersebut dalam mewujudkan kemerdekaannya; *kedua*, pengakuan Israel terhadap otoritas Palestina sehingga mereka dapat hidup berdampingan secara damai; dan *ketiga*, mungkin benar pernyataan Mahmoud Ahmedi Nejad yang dilontarkan beberapa waktu lalu “untuk mengirim pulang komunitas Yahudi ke Eropa”. *Wallhua’lam*.

Daftar Rujukan

Buku:

- Arief, Abdul Salam. 2004. “Politik Islam Antara Aqidah dan Kekuasaan Negara” dalam A.Maftuh Abegebriel dkk. *Negara Tuhan: the Thematic Encyclopaedia*. Jogjakarta: SR-Ins Publishing.
- Armstrong, Karen. 2002. *Islam: A Short History*. Yogyakarta: Ikon Tirelitera.
- Beinin, Joel & Stork, Joe. 1997. *Political Islam: Essay from Middle East Report*. London: IB Tauris.
- Cleveland, William. 1994. *A History of The Modern Midle East*. Boulder: Westview.
- Cohen, Amon. 1980. *Political Parties in West Bank under The Hashemite Regime 1949-1967*. Ithaca: Cornel UP.
- Edward, Beverly Milton. 2001. “West Bank dan Gaza” dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Esposito, Jhon L. Ed. Bandung: Mizan.
- , 2002. *Conflict in the Middle East*. Canada: Routledge.
- Esposito, John L. 1996. *Ancaman Islam Mitos atau Realitas*. Bandung: Mizan.
- (ed). 2004. *Islam: Kekuasaan Pemerintahan, Doktrin Iman, dan Realitas Sosial*. Jakarta: Inisiasi Press.
- Gerges, Fawaz A. 2002. *Amerika dan Islam Politik: Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan*. Jakarta: AlvaBet.
- Hunter, Shireen T. 2001. *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Laqueur, Walter. 2005. *New Terrorism: Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massal*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Legrain, Jean Francois. 2004. “Hamas Penerus Sah Nasionalisme Palestina?” dalam *Langkah Barat Menghadang Islam*. Yogyakarta: Jendela.
- , 2001. “Hamas” dalam Jhon L Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia IslamModern*. Bandung: Mizan.

- Long, David E and Reich, Bernard. 1980. *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*. Colorado: Westview Press Inc.
- Maryam, Siti (ed), dkk. 2003. *Sejarah Peradaban Islam dari masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Lesfi.
- Meuleman, Johan Hendrik. 2002. "Dinamika Abad ke-20" dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Miall, Hugh et all. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nels, Jhonson. 1982. *Islam and Politic of Meaning in Palestinian World*. London: Oxford University Press.
- Setiawati, Siti Mutiah (ed). 2004. *Irak di bawah Kekuasaan Amerika*. Yogyakarta: PPMTT.
- Sihbudi, Riza. 2004. *Palestina dalam Pandangan Imam Khomeini*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- , 1992. *Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington*. Mizan: Bandung.
- WAMY. 2002. *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*. Jakarta: al Ithisom.

Internet:

- www.Wikipedia. Diakses Selasa, 24 April 2012
- www.RepublikaOnline.com diakses 24 April 2012
- www.VivaNews.com diakses 24 April 2012
- www.Kompas.com